



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**

*Minahasa Semakin*  
**HEBAT!**

**RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN MINAHASA  
2019-2023**



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023 mempunyai arti strategis karena merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD Kabupten Minahasa Tahun 2019-2023

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

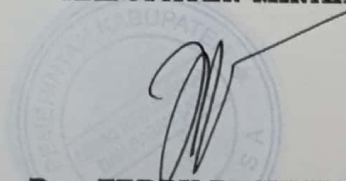
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023 disajikan dengan sistematika :

- I. Pendahuluan;
- II. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- III. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- IV. Tujuan dan sasaran;
- V. Strategi dan arah kebijakan;
- VI. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- VIII. Penutup.

Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa selama 5 (lima); 2019-2023. Melalui Penyusunan Renstra diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023 ini dibuat, sebagai acuan untuk melaksanakan Program Kerja SKPD.

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN MINAHASA,**



**Drs. TEDDY D. SUMUAL, MAP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650712 199203 1 010**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I      PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II      GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa	6
2.2 Sumber Daya SKPD	13
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa	15
2.4 Tantangan dan Peluang	20
BAB III     ISU-ISU STRATEGIS	23
3.1 Identifikasi Permasalahan	23
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26
3.3 Telaah Renstra Kementerian	30
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	33
BAB IV     TUJUAN DAN SASARAN	34
4.1.1 Tujuan	34
4.1.2 Sasaran	34
4.1.3 Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	35
BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
5.1 Strategi dan Kebijakan	39
BAB VI     RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
6.1 Rencana Program Dinas Kebudayaan dan Parwisata	42
6.2 Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Parwisata	43
BAB VII    KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
Pohon Kinerja	64
Cascading	66
BAB VIII   PENUTUP	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Minahasa, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata serta fungsi dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Untuk mendukung usaha pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah bidang Kebudayaan dan Kepariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat rencana kinerja dalam kurun waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun. Renstra ini merupakan penjabaran dari rencana pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023. Penyusunan dokumen Rencana Strategis merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara terintegratif terpadu dengan dokumen perencanaan yang lain dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, sehingga tercipta sinkronisasi berbagai program pembangunan yang saling mendukung. Hubungan Rencana Strategis dengan dokumen Perencanaan lainnya, adalah sebagai berikut :

➤ Hubungan Renstra dengan RPJMD

RPJMD merupakan dokumen jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa yang disusun sebagai dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif.

➤ Hubungan Renstra dengan Renja-SKPD

Renja-SKPD Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra.

Evaluasi terhadap pola pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang telah dilaksanakan melalui berbagai tanggapan, kritik dan saran merupakan input dalam perumusan penyusunan Rencana Strategis tahun 2019-2023, sehingga program yang dirumuskan dalam pola pembangunan kebudayaan dan pariwisata dapat sesuai dengan perkembangan di era globalisasi ini. Oleh karena itu pemasaran adalah suatu kegiatan yang merangkul semua pihak yang mempengaruhi dan menerobos semua permasalahan dan pengembangan aspek kebudayaan dan pariwisata.

Berkaitan dengan konsep pemasaran tersebut maka Kabupaten Minahasa melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan penelusuran dan kajian tentang bagaimana mengembangkan dan memasarkan kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Minahasa, yaitu dengan melakukan langkah strategis dalam membangun daya saing dan memasarkan Kabupaten Minahasa melalui “Pesona Minahasa” :

1. Menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan;
2. Memperlakukan wisatawan secara baik;
3. Menyiapkan dan membangun nuansa dan kawasan wisata yang aman dan nyaman;
4. Promosi wisata;
5. Kerjasama antar pelaku industri pariwisata;
6. Melestarikan nilai-nilai budaya yang bersifat multikultural.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Rencana Strategis disusun berdasarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan Struktur Organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman dalam pelaksanaannya. Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Dan Rencana Kerja Pemerintah Daeran;
13. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.17/PR.001/MKP/2010;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Provinsi Sulawesi Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2034;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;

18. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2019 tentang 2023 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023;
19. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa No. 01 Tahun 2019 tentang Tim Penyusunan Renstra Disbudpar.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023, yaitu :

a. Maksud :

1. Menjamin adanya konsistensi Pelaksanaan Program terhadap masalah dan potensi daerah serta kegiatan rutin sesuai dengan ketentuan pembangunan pariwisata dan kebudayaan daerah;
2. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program pembangunan yang sudah difokuskan secara partisipatif dengan semua Stake Holder pelaku pariwisata mulai dari penetapan misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sehingga dengan demikian setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun anggaran harus mengacu pada Renstra Dinas yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Minahasa 2019-2023;
3. Memperkuat landasan penetapan program dan kegiatan tahunan dinas secara kronologis dan berkelanjutan.

b. Tujuan :

1. Menjadi kerangka acuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Minahasa untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam proses penyelenggaraan pembangunan khususnya di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Mengarahkan fokus pelaksanaan kegiatan dinas sesuai dengan Rencana Strategis, yang saling berkaitan dengan visi dan misi dalam mewujudkan Kabupaten Minahasa sebagai salah satu destinasi pariwisata;
3. Mensosialisasikan rencana strategis kepada stakeholder dan masyarakat.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Sistematika Penulisan
- BAB II : Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Minahasa
  - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa
  - 2.2 Sumber Daya SKPD
  - 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Minahasa
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
- BAB III : Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan
  - 3.2 Visi, Misi dan Program
  - 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata
  - 3.4 Telaahan Renstra Kementerian Kebudayaan
- BAB IV : Tujuan dan sasaran
  - 4.1 Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa
  - 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII : Penutup



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA**

**2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun tugas dan fungsinya sebagai berikut :

**a. Tugas Pokok :**

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

**b. Fungsi :**

- 1) Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- 2) Pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata
- 3) Penyusunan rencana dan program pembangunan, pengawasan, dan pengendalian di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- 4) Pengkoordinasian, fasilitasi dan pemberian pertimbangan teknis atas izin usaha pariwisata;
- 5) Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata;
- 6) Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
- 8) Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan promosi Kebudayaan dan Pariwisata;
- 9) Pelaksanaan perkembangan sistem informasi, pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata;
- 10) Pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pengiriman, misi kesenian, dalam rangka kerjasama luar negeri;
- 11) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian;
- 12) Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian;
- 13) Pelaksanaan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan;

- 14) Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kebudayaan dan Pariwisata;
- 15) Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan museum;
- 16) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- 17) Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan
- 18) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.

**c. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang-Bidang
- d. Sub Bagian dan Kepala Seksi

Adapun tugas-tugas sebagaimana Struktur Organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas :
  1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pariwisata dan kebudayaan;
  2. Mengkoordinasikan penyusunan program Dinas, mengacu pada program Nasional dan daerah;
  3. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan budaya;
  4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pariwisata dan budaya;
  5. Menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di bidang pariwisata dan budaya;
  6. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan, dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
  7. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;
  8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- b. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai, pelayanan administrasi secara vertical dan horizontal, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, secretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
  2. Penyusunan program dan rencana kegiatan;
  3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian;
  4. Penyelenggaraan urusan umum;
  5. Penyelenggaraan urusan perlengkapan;
  6. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
  7. Penyelenggaraan urusan keuangan;
  8. Penyelenggaraan urusan rumah tangga;
  9. Penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan;
  10. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- c. Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang objek wisata, rekreasi dan hiburan umum, akomodasi rumah makan dan bar serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan Nasional dan Provinsi serta penetapan kebijakan daerah di bidang kepariwisataan;
  2. Pelaksanaan pedoman Nasional, Provinsi dan penetapan pedoman penyelenggaraan kepariwisataan daerah;
  3. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepariwisataan;
  4. Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan, akomodasi rumah makan dan bar;
  5. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan pertimbangan teknis atas ijin kegiatan kepariwisataan;
  6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
  7. Pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kegiatan.
- d. Bidang Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di Bidang informasi dan promosi, penyuluhan dan bimbingan wisata, kerjasama dan pemasaran serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemasaran dan Promosi menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan Nasional dan Provinsi serta penetapan kebijakan daerah di bidang pemasaran dan promosi pariwisata;
2. Pelaksanaan pedoman Nasional, Provinsi dan penetapan pedoman penyelenggaraan pemasaran dan promosi pariwisata;
3. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemasaran dan promosi pariwisata;

4. Pelaksanaan kerjasama di bidang pariwisata;
  5. Pelaksanaan promosi pariwisata;
  6. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata;
  7. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan wisata;
  8. Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan
  9. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.
- e. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang pelestarian dan budaya tradisional, permusiuman, kepurbakalaan dan arkeologi, sejarah dan nilai tradisional serta melakukan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan Nasional dan Provinsi serta penetapan kebijakan daerah di bidang kebudayaan;
  2. Pelaksanaan pedoman Nasional, Provinsi dan penetapan pedoman di bidang kebudayaan;
  3. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang kebudayaan;
  4. Pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan;
  5. Pelaksanaan pelestarian dan budaya tradisional;
  6. Pelaksanaan permuseuman, kepurbakalaan dan arkeologi;
  7. Pelaksanaan sejarah dan nilai tradisional;
  8. Pelaksanaan evaluasi; dan
  9. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.
- f. Bidang Kesenian mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang pengembangan dan pelestarian seni tradisional dan non tradisional, atraksi seni, pengembangan minat dan bakat serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Kesenian menyelenggarakan fungsi :

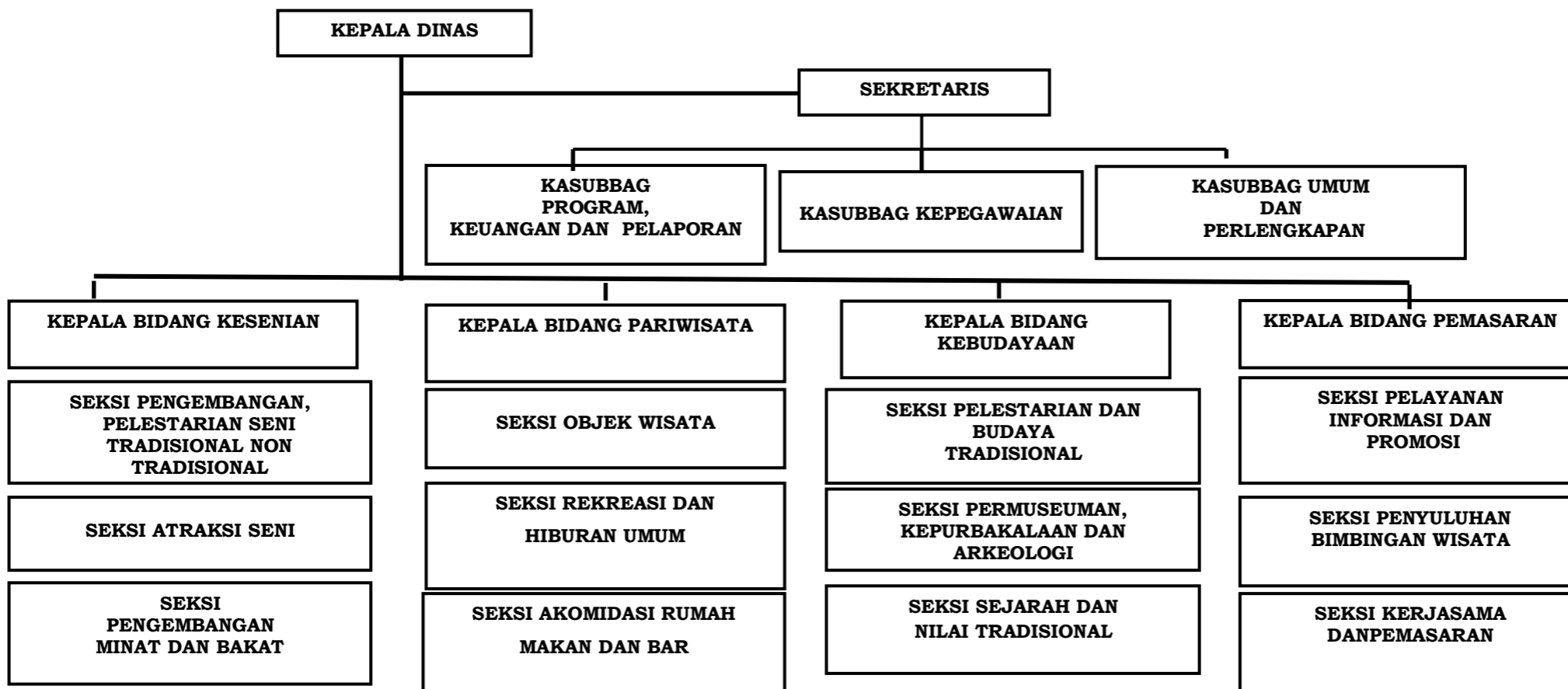
1. Pelaksanaan kebijakan Nasional dan Provinsi serta penetapan kebijakan daerah di bidang kesenian;
2. Pelaksanaan pedoman Nasional, Provinsi dan penetapan pedoman di bidang kesenian;
3. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesenian;
4. Pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan;
5. Pelaksanaan pengembangan dan pelestarian seni tradisional dan non tradisional;
6. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan atraksi seni;
7. Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan minat dan bakat seni;

8. Pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian;
9. Pelaksanaan pembentukan dan / atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian;
10. Pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan asset atau benda kesenian (Karya seni);
11. Penyelenggaraan festival, pameran dan lomba seni;
12. Pelaksanaan evaluasi; dan
13. Penyusunan dan pelaporan hasil kegiatan.

Penjabaran Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa ke dalam bidang, sub bidang dan seksi adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Kasubag Program Keuangan dan Pelaporan;
  - b. Kasubag Kepegawaian;
  - c. Kasubag Umum dan Perlengkapan.
2. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pelestarian dan Budaya Tradisional;
  - b. Seksi Permuseuman Kepurbakalaan dan Arkeologi;
  - c. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional.
3. Bidang Pemasaran dan Promosi, terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan Informasi dan Promosi;
  - b. Seksi Penyuluhan Bimbingan Wisata;
  - c. Seksi Kerjasama dan Pemasaran.
4. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
  - a. Seksi Objek Wisata;
  - b. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum;
  - c. Seksi Akomodasi, Rumah Makan dan Bar.
5. Bidang Kesenian, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan minat dan Bakat;
  - b. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni Tradisional;
  - c. Seksi Atraksi Seni.

**Tabel. 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa**



## 2.2 SUMBER DAYA SKPD

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh :

Kepala Dinas (Eselon II B)

Sekretaris (Eselon III A)

- Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan (Eselon IV A)
- Kepala Subbagian Kepegawaian (Eselon IV A)
- Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan (Eselon IV A)

Kepala Bidang Kesenian (Eselon III B)

- Seksi Pengembangan, Pelestarian Seni Tradisional (Eselon IV A)
- Seksi Atraksi Seni (Eselon IV A)
- Seksi Pengembangan Minat (Eselon IV A)

Kepala Bidang Pariwisata (Eselon III B)

- Kepala Seksi Objek Wisata (Eselon IV A)
- Kepala Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum (Eselon IV A)
- Kepala Seksi Akomodasi, Rumah Makan dan Bar (Eselon IV A)

Kepala Bidang Kebudayaan (Eselon III B)

- Kepala Seksi Pelestarian dan Budaya Tradisional (Eselon IV A)
- Kepala Seksi Permuseuman, kepurbakalaan, dan arkeologi (Eselon IV A)
- Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional (Eselon IV A)

Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi (Eselon III B)

- Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Promosi (Eselon IV A)
- Kepala Seksi Penyuluhan Bimbingan Wisata (Eselon IV A)
- Kepala Seksi Kerjasama dan Pemasaran (Eselon IV A)

### a. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan (Inventaris)

#### 1. Kepegawaian

Sesuai data terakhir pada bulan Januari 2021, keadaan pegawai menurut Golongan, Pendidikan, Diklat Penjenjangan dan Eselon adalah sebagai berikut :

- |                   |   |          |
|-------------------|---|----------|
| a. Jumlah Pegawai | : | 21 orang |
| - Golongan II     | : | orang    |
| - Golongan III    | : | 16 orang |
| - Golongan IV     | : | 5 orang  |
| b. Pendidikan     |   |          |
| - S M U           | : | 0 orang  |
| - D3/Sarjana Muda | : | 0 orang  |
| - S1              | : | 16 orang |
| - S2              | : | 5 orang  |

- c. Diklat Penjenjangan
  - Sepada/Adum/Pim IV : 5 orang
  - Spama/Pim III : 3 orang
  - Spamem/Pim II : 0 orang
- d. Jabatan Struktural
  - Eselon II B : 1 orang
  - Eselon III A : 1 orang
  - Eselon III B : 4 orang
  - Eselon IV A : 15 orang

**Tabel. 2.2**  
**Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten**  
**Minahasa**

NO	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	1
4.	IV/b	1
5.	IV/a	3
6.	III/d	11
7.	III/c	3
8.	III/b	1
9.	III/a	-
10.	II/d	-
11.	II/c	-
12.	II/b	-
13.	II/a	-

*Posisi Bulan Oktober 2021*

**b. Sarana dan Prasarana Aset**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki 2 gedung kantor yang dibangun diatas tanah pemerintah, kendaraan Dinas roda 4 sebanyak 1 unit, saluran telepon 1 line, fasilitas computer terdiri dari 6 unit computer PC dan 3 unit laptop dalam kondisi baik yang didukung oleh jaringan internet yang bisa diakses diseluruh ruangan. Jaringan ini merupakan media komunikasi yang efektif, baik untuk kepentingan intern Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maupun dapat diakses instansi lain serta masyarakat yang membutuhkan informasi. Memiliki fasilitas ruangan dengan meja dan kursi dan lemari yang memadai serta MCK yang layak dipakai, memiliki pula alat musik daerah berupa kulintang dan music bamboo klarinet serta pakaian tari-tarian dan perlengkapan. Keberadaan barang /aset daerah yang ada di bawah tanggung jawab Dinas



Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa tercatat dalam inventarisasi aset SKPD.

**c. Anggaran**

Selanjutnya untuk menggambarkan potensi anggaran pelayanan SKPD pada periode Renstra sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa dari sisi anggaran sektor pariwisata mengalami kenaikan setiap tahun, namun pada tahun 2017, terjadi pengurangan anggaran hingga tahun 2018. Berikut disajikan data alokasi dan realisasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa periode tahun 2013 sampai tahun 2018 pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD SKPD Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tahun 2013 s/d 2021**

<b>TAHUN</b>	<b>TOTAL BELANJA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>%</b>	<b>KET</b>
2013	5.684.606.000	5.256.895.780	92,47	-
2014	9.510.662.000	8.248.505.602	86,73	-
2015	14.610.891.950	14.256.311.192	97,57	-
2016	19.286.612.000	18.141.432.237	94,06	-
2017	15.618.950.000	14.204.725.718	90,95	-
2018	7.972.245.631	7.141.730.862	89,59	-
2019	8.452.923.667	7.568.867.083	89,54	-
2020	9.351.501.182	8.335.083.693	89,13	-
2021	4.633.357.712	4.008.455.193	86,51	

**2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA**

Kinerja Pelayanan SKPD Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, antara lain :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Apresiasi dan Peran masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya;
3. Terlestarikannya Cagar Budaya;
4. Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Minahasa.

**Tabel 2.1 (T.C-23)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**  
**Kabupaten Minahasa**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah cagar budaya yang di kelola secara terpadu				18 Cagar Budaya	18 Cagar Budaya	18 Cagar Budaya	18 Cagar Budaya	18 Cagar Budaya	18 Cagar Budaya	21 Cagar Budaya				1,00	1,16			
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan				39 Bemda, Situs	43 Bemda, Situs	48 Bemda, Situs	53 Bemda, Situs	58 Bemda, Situs	39 Bemda, Situs	61 Bemda, Situs				1,00	1,41			
3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi				6 Karya Budaya	6 Karya Budaya	7 Karya Budaya	7 Karya Budaya	8 Karya Budaya	6 Karya Budaya	6 Karya Budaya				1,00	1,00			
4.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya				1 Fest	1 Fest	1 Fest	1 Fest	1 Fest	1 Fest	1 Fest				1,00	1,00			
5.	Jumlah Kesenian Daerah yang dikembangkan				6 Kesenian	6 Kesenian	7 Kesenian	7 Kesenian	8 Kesenian	6 Kesenian	6 Kesenian				1,00	1,00			
6.	Jumlah kunjungan wisata mancanegara				89.355 Wisman	93.823 Wisman	98.514 Wisman	103.440 Wisman	108.612 Wisman	154.000 Wisman	12.100 Wisman				1,72	0,12			

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7.	Jumlah kunjungan wisata nusantara				1.208. 708 Wisman	1.269. 143 Wisman	1.332. 600 Wisman	1.399. 230 Wisman	1.469. 192 Wisman	1.760. 000 Wisman	704. 000 Wisman				1,45	0,55			
8.	Optimalisasi kuantitas dan kualitas SDM bidang pariwisata				200 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	200 Orang	200 Orang				1,00	1,00			
9.	Dokumen regulasi pembangunan kepariwisataan daerah				1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men			1 Doku men	1 Doku men				1,00	1,00			
10.	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata				200 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	200 Orang	200 Orang				1,00	1,00			

Tondano, Desember 2021  
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Minahasa



DRS. TEDDY D. SUMUAL, MAP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650712 199203 1 010

**Tabel T-C.24.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa**

No	URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	263.838.939,-	332.028.250,-				278.608.094	325.842.960,-				93,75%	98,14%				25,84%	
2.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	229.009.900,-	111.951.000,-				70.856.000	101.435.060,-				83,85%	90,61%				-51,11%	
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	22.000.000,-	0,-				41.734.000	0,-				88,16%	93,39%					
4.	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.000.000,-	7.317.177,-					7.317.177,-					100,00%					
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			3.101.296.583					3.072.693.285					99,08%				
4.	Program Pengembangan pemasaran pariwisata	616.501.961,-	1.224.317.348,-	779.540.104			2.399.964.200	1.220.140.662,-				99,22%	99,66%					

No	URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.	Program pengembangan destinasi pariwisata	3.501.918.867,-	3.777.978.995				1.975.959.050	2.824.986.116,-				63,72%	74,78%					
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			519.130.873					145.657.678					28.44%				
6.	Program pengelolaan keragaman budaya	577.630.000,-	568.442.206					562.079.648,-					98,88%					
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional			2.100.000					2.100.000					100.00%				
7.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	56.140.000,-	72.742.206,				0	72.617.206,-				0	99,83%					
	Program Pengembangan Kebudayaan			156.913.630					156.913.630					100.00%				
8.	Program pengembangan kemitraan	841.635.000,-	753.235.000				0	750.780.300,-				0	99,67%					

Tondano, Desember 2021  
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. Teddy D. Sumual, MAP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650712 199203 1 010

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Analisa situasi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa menggunakan Analisis SWOT dengan melibatkan stakeholder terkait.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Analisa situasi Rencana Strategis Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa menggunakan SWOT Analisis dengan melibatkan stakeholder terkait diperoleh hasil sebagai berikut:

### a. Analisa Faktor Lingkungan Internal

Faktor Internal	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
SDM	Tersedianya institusi pendidikan di bidang pariwisata	Kualitas SDM bidang pariwisata masih rendah, dan kurangnya minat pelajar pada pendidikan bidang pariwisata
	Pelatihan standarisasi usaha jasa pariwisata	Terbatasnya kuota peserta pelatihan standarisasi usaha jasa pariwisata
	Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota untuk menentukan pembangunan Kebudayaan dan pariwisatanya	Rendahnya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan/pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata secara sinergi
	Tupoksi dan susunan organisasi secara jelas deskripsinya (job description) sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan program/kegiatan	Rendahnya/belum optimalnya koordinasi antar bidang tugas
	DANA	Adanya dukungan dana APBN dan APBD
SARANA DAN PRASARANA	Adanya investasi pada pembangunan objek wisata	Kurang minat investasi pada pembangunan objek wisata
		Terbatasnya insentif pajak untuk investasi di bidang pariwisata
POTENSI	Tersedianya RIPPARKAB untuk akselerasi pembangunan pariwisata	RIPPARKAB belum diPerdakan karena dalam proses review materi teknis
	Tersedianya PPKD (Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah)	PPKD masih dalam proses perampungan
	Sumber daya alam sebagai potensi pariwisata bervariasi antara lain laut, pantai, pegunungan, terdapat wisata buatan serta wisata budaya tradisional dan kuliner	Potensi pariwisata yang merupakan objek-objek wisata belum dikelola secara profesional

b. Faktor Lingkungan Eksternal

Faktor Eksternal	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
EKONOMI	Kabupaten Minahasa Mengalami Pertumbuhan Perekonomian	Masuknya investasi, tenaga kerja dari negara lain. Peningkatan persaingan antar usaha jasa pariwisata.
KEBIJAKAN	Otonomi daerah memberikan kewenangan untuk menentukan pembangunan Kebudayaan dan pariwisatanya masing-masing	Kebijakan /tujuan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata sering berubah seiring pergantian Kepala Daerah. Rendahnya koordinasi dan arahan/pembinaan dalam pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata. Pelaksanaan program/kegiatan yang tidak sesuai dengan program/kegiatan Pemerintah Pusat/Pemprov.
	Arahan Pemerintah Provinsi untuk program Good Governance memicu Kabupaten/Kota melaksanakan program/kegiatan sesuai ketentuan dan peraturan.	Pelaksanaan program/kegiatan belum optimal karena menghindari kekeliruan ataupun kurangnya pemahaman terhadap implementasi ketentuan/peraturan yang berlaku. Kurangnya pembinaan/pelatihan/Sosialisasi tentang ketentuan/peraturan dalam pelaksanaan program Good Governance
SOSIAL	Terbukanya kesempatan kerja yang semakin luas	Dampak negative dari berkembangnya industri pariwisata antara lain: Trafficking, Peredaran Narkoba, Minuman Keras/Alkohol, Situasi keamanan rawan, dll
TEKNOLOGI	Kemajuan Iptek pada pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Rendahnya pemanfaatan Iptek disebabkan rendahnya kapasitas SDM Iptek Keterbatasan dana dalam pemanfaatan Iptek untuk menunjang pengembangan Budpar
LINGKUNGAN	Kondisi lingkungan kondusif untuk pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Pembangunan infrastruktur belum berwawasan pada kebutuhan sarana prasarana pendukung suatu objek wisata. Kondisi geografi objek wisata yang sulit dan keterjangkauan dipengaruhi cuaca

Analisa SWOT

Strategi SO	:	Mengoptimalkan segala sumber daya Kebudayaan dan Pariwisata dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mewujudkan salah satu destinasi pariwisata berdaya saing yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera;
Strategi WO	:	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, memanfaatkan peluang investasi untuk pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata terutama industri pariwisata
Strategi ST	:	Memaksimalkan segala potensi sumber daya Kebudayaan dan Pariwisata yang ada dan meminimalisasi segala ancaman untuk mewujudkan masyarakat sejahtera



## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS

#### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa adalah :

1. Perlunya penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA).

Pentingnya disusun RIPPARDA adalah untuk memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mengatur peran setiap *stakeholders* terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

2. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata

Suatu daerah yang memiliki potensi sumber daya yang mampu menjadi destinasi wisata, akan sangat efektif bila hal tersebut didukung dengan pengelolaan kawasan wisata yang optimal. Di Kabupaten Minahasa pengelolaan kawasan wisata belum cukup optimal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa masalah seperti :

a. Belum optimalnya pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu.

Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- Perlunya penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA)
- Pengembangan ekonomi masih terpusat pada beberapa kawasan pariwisata saja;
- Kualitas Pengelolaan kawasan wisata belum optimal;
- Belum optimalnya Penyusunan rencana pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis;
- Belum optimalnya pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas obyek wisata (rambu-rambu, papan informasi, tempat sampah, akses jalan lingkungan dan sarana sanitasi);
- Kurang optimalnya perkembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat.

b. Belum optimalnya pengembangan seni budaya lokal dan sejarah purbakala.

Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan kelompok seni tradisional masih rendah;
- Kurang tersedianya fasilitas dan sarana pengembangan kesenian dan budaya daerah;
- Belum optimalnya pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat;
- Masih banyak situs dan benda peninggalan sejarah yang belum dilestarikan dengan baik.

c. Belum efektifnya pemasaran destinasi wisata.

Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- Belum berkembangnya paket-paket wisata minat khusus;
- Potensi pasar belum tergambar dengan maksimal;
- Belum adanya fokus destinasi yang akan dikembangkan atau dipromosikan (negara tujuan promosi);
- Kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata belum maksimal.

### 3. Belum efektifnya kelembagaan

Rendahnya kapasitas kelembagaan merupakan penyebab pengelolaan pariwisata di Kabupaten Minahasa. Meningkatnya kompleksitas manajemen memerlukan penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan secara memadai dan berkelanjutan. Kapasitas kelembagaan bukan hanya mencakup institusi yang efisien melainkan juga aparatur birokrasi yang berkualitas, serta regulasi yang kuat dan sehat. Kapasitas kelembagaan yang memadai dapat menjamin ketercapaian stabilitas perekonomian melalui pengelolaan bidang budaya dan pariwisata. Belum efektifnya kapasitas kelembagaan disebabkan oleh beberapa masalah seperti:

#### a. Belum optimalnya fungsi dan kerjasama antarlembaga pariwisata.

Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- Belum siapnya badan pengelola di setiap kawasan wisata;
- Kurangnya koordinasi antarskpd dan swasta;
- Rendahnya sdm pelaku jasa pariwisata.

#### b. Belum optimalnya kapasitas SDM pariwisata. Hal ini disebabkan oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja;
- Kurangnya pelatihan formal bagi SDM pariwisata.

**Tabel 3.1**  
**Pokok Masalah, Masalah dan Faktor/Akar Masalah**  
**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa**

No	POKOK MASALAH	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1.	Perlunya Perda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARKAB)	Belum optimalnya pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum diperdakannya Rencana Induk Pariwisata daerah sebagai roadmap pengembangan pariwisata sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) dan Kawasan</li> </ul>

			<p>Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RIPPARKAB sampai dengan Tahun 2020 telah selesai direview dan akan dilanjutkan dengan proses Perda.</li> <li>• Belum optimalnya Penyusunan rencana pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis;</li> </ul>
2.	Perlunya Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata	a. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata secara menyeluruh dan berkelanjutan;</li> <li>• Pengembangan ekonomi masih terpusat pada beberapa kawasan pariwisata saja;</li> </ul>
		b. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana Pariwisata seperti hotel, restoran yang memadai, sarana transportasi menuju daerah destinasi wisata, perbaikan infrastruktur jalan wisata serta semua yang terkait dengan akomodasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas obyek wisata (rambu-rambu, papan informasi, tempat sampah, akses jalan lingkungan dan sarana sanitasi);</li> <li>• Kurang optimalnya perkembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat.</li> </ul>
3.	Perlunya Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata.	Belum efektifnya pemasaran destinasi wisata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya perencanaan/persiapan event setahun sebelumnya (kalender event);</li> <li>• Belum berkembangnya paket-paket wisata minat khusus;</li> <li>• Potensi pasar belum tergambar dengan maksimal;</li> <li>• Belum adanya fokus destinasi yang akan dikembangkan atau dipromosikan (negara tujuan promosi);</li> <li>• Kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata belum maksimal.</li> </ul>

4.	Perlunya pengembangan seni budaya lokal dan sejarah purbakala.	Belum adanya Dokumen PPKD (Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan kelompok seni tradisional masih rendah;</li> <li>• Kurang tersedianya fasilitas dan sarana pengembangan kesenian dan budaya daerah;</li> <li>• Belum Optimalnya pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat;</li> <li>• Masih banyak situs dan benda peninggalan sejarah yang belum dilestarikan dengan baik.</li> </ul>
5.	Belum efektifnya kelembagaan	<p>Belum optimalnya fungsi dan kerjasama antarlembaga pariwisata.</p> <p>Belum optimalnya kapasitas SDM pariwisata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum siapnya badan pengelola di setiap kawasan wisata;</li> <li>• Kurangnya koordinasi antarskpd dan swasta;</li> <li>• Rendahnya sdm pelaku jasa pariwisata.</li> <li>• Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja;</li> <li>• Kurangnya pelatihan formal bagi SDM pariwisata.</li> </ul>

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

**VISI** Bupati dan Wakil Bupati Minahasa adalah :

**MINAHASA MAJU DALAM EKONOMI DAN BUDAYA, BERDAULAT, ADIL, DAN SEJAHTERA.**

**MISI** Bupati dan Wakil Bupati Minahasa adalah :

1. Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata;
3. Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan; dan
4. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan
5. Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;

Pengertian dari Visi diatas yakni :

<b>Maju Dalam Ekonomi</b>	<b>Maju Dalam Budaya</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memenuhi kebutuhan dasar baik pangan, sandang dan papan sebagai bentuk kemandirian daerah</li> <li>2. Mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif</li> <li>3. Mampu meningkatkan penerimaan daerah</li> <li>4. Mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB per kapita</li> <li>5. Mampu meningkatkan kinerja UKM/UMKM/IKM dan koperasi yang berdaya saing</li> <li>6. Mampu membangun infrastruktur dasar sesuai standar pelayanan minimum</li> <li>7. Mampu melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan hidup</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, religius, cerdas dan sehat serta mampu memiliki daya saing</li> <li>2. Kemampuan masyarakat menjaga keragaman dan kekayaan budaya daerah</li> <li>3. Kemampuan membangun jati diri dan karakter bangsa melalui revolusi mental dalam penyelenggaraan hidup bermasyarakat dan bernegara</li> <li>4. Kemampuan membangun dan menjaga warisan tradisi budaya daerah minahasa sebagai bentuk kearifan lokal dan penghargaan terhadap jati diri masyarakat</li> <li>5. Kemampuan meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK melalui penelitian, dan pengembangan menuju inovasi berkelanjutan</li> <li>6. Kemampuan aparatur sipil negara menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud kedaulatan dalam pemerintahan</li> <li>7. Kemampuan mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan hidup</li> </ol>

<b>Berdaulat</b>	<b>Adil</b>	<b>Sejahtera</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memastikan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan hidup masyarakat dalam suasana kerukunan berdasarkan falsafah Pancasila</li> <li>2. Mampu menyelenggarakan demokrasi yang berkualitas dan berwibawa</li> <li>3. Kemampuan pemerintah menegakkan peraturan daerah, mencegah tindak kriminalitas</li> <li>4. Kemampuan pemerintah mendorong partisipasi politik masyarakat</li> <li>5. Mampu menjaga toleransi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berhasil melaksanakan standar pelayanan minimum</li> <li>2. Berhasil mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduk</li> <li>3. Berhasil mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah</li> <li>4. Berhasil melaksanakan pengarusutamaan gender disetiap aspek pembangunan</li> <li>5. Berhasil dalam perlindungan anak, perempuan, dan lansia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran</li> <li>2. Mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia</li> <li>3. Berhasil meningkatkan produktifitas rakyat termasuk kesejahteraan petani dan pelayan</li> <li>4. Kemampuan meningkatkan daya saing tenaga kerja di tataran nasional dan</li> </ol>

## NAWACITA R3D

- Menghadirkan Pemerintah yang melindungi segenap masyarakat Minahasa, memberikan rasa aman dilandasi kepentingan efektif, demokratis dan berbangsa dan bernegara
- Membuat Pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya
- Membangun Minahasa dari pinggiran dengan memperkuat daerah pedesaan Minahasa
- Memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Minahasa melalui percepatan pembangunan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Minahasa yang sehat, cerdas, terdidik dengan karakter kepribadian yang berdaya saing
- Meningkatkan produktivitas rakyat sehingga Minahasa bisa maju dan sejahtera
- Membentuk karakter masyarakat Minahasa dengan memperkuat semangat Mapalus dan Si Tou Timou Tu Mou Tou
- Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial dengan menciptakan ruang dialog antar warga
- Memastikan terselenggaranya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

## 10 Sasaran Pembangunan Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023

### 10 SASARAN PRIORITAS

1	Mapalus (Masyarakat Peduli dan Tulus Untuk Semua)
2	RR-RD (Rakyat Ramah, Rukun dan Damai)
3	RR-RD Tondano (Rehabilitasi, Revitalisasi, dan Rekreasi Danau Tondano)
4	Sumikolah
5	Lansia Sehat
6	Rumah Tinggal Layak Huni
7	Pengembangan Infrastruktur
8	Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata
9	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Energi Terbarukan
10	Birokrasi Handal dan Profesional

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tahun 2019 – 2023 maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendukung pelaksanaan Misi tersebut

sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, selanjutnya dari Misi yang telah ditetapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi dalam tabel 3.2

**Tabel 3.2**  
**Faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa**

<b>Visi : MINAHASA MAJU DALAM EKONOMI DAN BUDAYA, BERDAULAT, ADIL, DAN SEJAHTERA.</b>				
<b>No</b>	<b>Misi Bupati / Wakil Bupati</b>	<b>Permasalahan dan Pelayanan SKPD</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
1	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata	Belum optimalnya pengelolaan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata secara menyeluruh dan berkelanjutan;</li> <li>• Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas obyek wisata (rambu-rambu, papan informasi, tempat sampah, akses jalan lingkungan dan sarana sanitasi);</li> <li>• Kurang optimalnya perkembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minahasa memiliki banyak potensi wisata alam maupun wisata buatan</li> <li>• Terdapat Potensi SDM pariwisata yang bisa dikembangkan</li> </ul>
2.	Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Perlunya melakukan Penguatan kapasitas Manajemen birokrasi dan tata kelola pemerintahan dalam rangka membangun birokrasi yang handal dan profesional yang berdampak pada peningkatan kinerja pemerintahan yang lebih baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Birokrasi yang belum efisien, efektif, disiplin dan budaya organisasi yang lemah;</li> </ul>	Sumber Daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Minahasa, sehingga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, agar mampu memberikan daya saing yang tinggi



### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian

#### 1.) Telaah Renstra Kementerian Pariwisata

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata Daerah diharuskan bersinergi dengan Kementerian Pariwisata. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan pariwisata Kabupaten Minahasa terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional yang diterapkan oleh kementerian tersebut.

Sementara Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi Kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah:

“PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Visi Kemenparekraf/Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu (i) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju; (ii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing; (iii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan; serta (iv) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Misi Kemenparekraf/Baparekraf juga harus selaras Misi Kemenparekraf/Baparekraf juga harus selaras dengan Misi Presiden Republik Indonesia, sehingga Misi Kemenparekraf/Baparekraf yaitu:

- (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

- (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8.

## 2). Telaah Renstra Kementerian Kebudayaan

Dalam rangka mengembangkan Kebudayaan Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan visi pembangunan Kebudayaan yaitu “Terbentuknya insan dan ekosistem kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong “.

Cita cita pembangunan Kebudayaan Nasional lebih menekankan pada penguatan identitas kebudayaan dan jatidiri bangsa dalam rangka meningkatkan martabat, mendapatkan pengakuan dan penghargaan dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam pergaulan dunia. Untuk mencapai visi tersebut, misi yang akan ditempuh adalah :

1. Meningkatkan insan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong dalam rangka pelestarian dan pemajuan kebudayaan
2. Mewujudkan ekosistem kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong antar pemerintah dan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya berdasarkan misi pembangunan kebudayaan yang telah dijelaskan diatas maka tujuan pembangunan kebudayaan dirumuskan sebagai berikut:

1. Penguatan Pengelolaan kebudayaan yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan
2. Penguatan insan dan ekosistem pembangunan kebudayaan melalui pelestarian dan pemajuan kebudayaan
3. Peningkatan mutu kelembagaan dalam tata kelola kebudayaan

Selanjutnya berdasarkan misi pembangunan kebudayaan sebagaimana dijelaskan diatas maka sasaran strategis dan indikator sasaran strategis pembangunan kebudayaan dirumuskan sebagai berikut :

Sasaran meningkatnya mutu tata kelola kebudayaan dalam mewujudkan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan

1. Jumlah regulasi di tingkat Pusat dan Provinsi yang terkait dengan peningkatan mutu tata kelola Kebudayaan yang telah ditetapkan
2. Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional mencapai kategori sedang (54.60%)

Analisis Renstra Kementerian dan Lembaga dan Renstra Dinas Kebudayaan daerah Kabupaten Minahasa bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan , sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan Daerah Kabupaten Minahasa terhadap sasaran Renstra Kementerian dan Lembaga sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing masing.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan Renstra SKPD Provinsi / Kementerian / Kota Lain digambarkan dalam table sebagai berikut :

**Tabel. 3.3**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan Renstra SKPD Provinsi / Kementerian / Kota Lain**

No	Sasaran jangka Menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pemasaran Promosi Pariwisata	Kurangnya Media Promosi	Dukungan Dana	Fasilitas Promosi
2.	Pembangunan Destinasi Pariwisata	Belum tertatanya destinasi pariwisata	Belum maksimal pengelolaan	Tersedia potensi pariwisata
3.	Pengembangan Kebudayaan	Kesadaran pemahaman budaya makin pudar	Pengaruh modernisasi	Potensi budaya daerah yang beraneka ragam

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

- Tata Ruang Wilayah yang mendukung :
  1. Memiliki potensi objek wisata alam yang indah dan menjadi tujuan para wisatawan;
  2. Memiliki seni dan budaya daerah yang beragam dan potensi wisata religi yang berkolaborasi dengan kunjungan wisatawan;
  3. Sumber daya masyarakat yang menyadari pentingnya pariwisata dalam pembangunan dan gambaran kemajuan masyarakat yang ada;
  4. Banyaknya potensi wisata yang belum dikelola.
- Tata Ruang Wilayah yang menghambat :
  1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
  2. Pemberdayaan tenaga ahli dibidang pariwisata dalam pengembangan pariwisata masih kurang;
  3. Teknologi penunjang kepariwisataan yang belum mendukung;
  4. Pembenahan dan perawatan lingkungan objek-objek wisata yang belum terkoordinasi dan perlu melibatkan instansi terkait.
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  1. Lingkungan Strategis sebagai peluang
    - Era perdagangan bebas membuka kesempatan bagi investor asing
    - Era otonomi membuka peluang bagi daerah untuk lebih menggali, potensi mengkaji dan memasarkan produk pariwisata
  2. Lingkungan Strategis sebagai ancaman
    - Kurang koordinasi antara instansi-instansi terkait
    - Kurangnya hubungan dan koordinasi antara para pengelola objek dan sarana pariwisata dengan instansi terkait.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 merupakan aspek penentuan kebijakan umum pembangunan jangka menengah berdasarkan permasalahan pembangunan. Secara khusus, isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Minahasa untuk periode pemerintahan 2018-2023 yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah, dan sesuai dengan Misi yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Minahasa, yaitu : (1). Kemandirian ekonomi dengan mendorong sector pertanian, Perikanan dan pariwisata (2). Manajemen birokrasi yang profesional melalui tata kelola Pemerintahan yang baik

Adapun isu-isu strategis yang perlu diangkat dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa antara lain :

1. Perlunya peningkatan Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
2. Pembangunan Industri Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata yang menjadi focus pemasaran;
3. Belum diselesaikannya Rencana Induk Pariwisata daerah sebagai roadmap pengembangan pariwisata sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
4. Belum optimalnya partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing pariwisata dan belum optimalnya kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran renstra adalah dengan menjabarkan Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan renstra perangkat daerah untuk periode lima tahun. Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan perangkat daerah untuk operasionalisasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Sasaran RPJMD diterjemahkan ke dalam sasaran tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD.

##### **4.1.1 TUJUAN**

Tujuan berarti hal yang ingin dituju; adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang diperlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada isu-isu strategis. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta searahdengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah menetapkan Tujuan dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahun kedepan yang diturunkan langsung dari sasaran ke-3 RPJMD, yaitu : **“MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PARIWISATA”**

#### 4.1.2 SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Oleh karena itu, memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Minahasa, serta disesuaikan dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, mengenai Peraturan Pelaksanaan Pemerintah tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, terkait Indikator Kinerja untuk Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pelaksanaan Pemerintah sebagai Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya apresiasi dan peran masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata.

#### 4.2 Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa periode 2018-2023 yaitu :

VISI :

***“Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil, dan Sejahtera”***

Visi tersebut mengandung lima elemen penting dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 yakni ekonomi, budaya, berdaulat, adil, dan sejahtera.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat

dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *stakeholders* pembangunan secara keseluruhan.

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan Visi Misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terkait dengan misi yang ke -2, yaitu : **“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata”**, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa mempunyai Visi :

**“MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN”**

Adapun Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa :

1. Mengembangkan Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
2. Mengembangkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
3. Mengembangkan Pengelolaan Kekayaan Budaya;
4. Mengembangkan Pengelolaan Keragaman Budaya;
5. Meningkatkan Pelestarian cagar Budaya;
6. Mengembangkan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Meningkatkan kompetensi, kualitas dan akuntabilitas aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Adapun tujuan, sasaran dan target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dapat dilihat dalam table 4.1 ( TC.25)



**Tabel 4.1 (T-C. 25)**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MINAHASA**

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -									
				SASARAN	I (2019)	II (2020)	III (2021)	IV (2022)	V (2023)					
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9					
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah <b>Indikator :</b> <i>Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah</i>	1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	1 Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (IT)		CC		B		BB		BB		A
				2 Kepuasan stakeholders terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah (Score 1 - 4)		4		4		4		4		4
2	Meningkatnya apresiasi dan peran masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya	2	Telestarikannya Karya budaya dan Kesenian Tradisional	3 Persentase pelestarian warisan budaya (Program pengembangan kebudayaan) <i>Rumus : Jumlah warisan budaya (cagar budaya, karya budaya dan kesenian tradisional) yg terlestarikan per jlh warisan budaya (cagar budaya, karya budaya dan kesenian tradisional) yang terdata</i>	88		142		145		149		153	
						76.14 %		83.10 %		84.14 %		83.89 %		83.55 %
					67		118		118		123		127	

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -									
					I (2019)		II (2020)		III (2021)		IV (2022)		V (2023)	
					5	6	7	8	9					
	<b>Indikator :</b> <i>Persentase pelestarian warisan budaya</i>			<b>4</b> <b>Persentase karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi</b> <i>Rumus: Jumlah Jenis karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi per jumlah jenis karya budaya dan kesenian tradisional yang terdata</i>	9		9		9		10		10	
					6	<b>66.67 %</b>	6	<b>66.67 %</b>	6	<b>66.67%</b>	7	<b>70.00 %</b>	7	<b>70.00 %</b>
					79	<b>77.22 %</b>	133	<b>84.21 %</b>	136	<b>82.35 %</b>	139	<b>83.45 %</b>	142	<b>84.51 %</b>
3	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata</b>  Indikator : 1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4	<b>Terlestarikannya Cagar Budaya</b>	<b>5</b> <b>Persentase cagar budaya yang dilestarikan</b> <i>Rumus : Jumlah cagar budaya yg terlestarikan per jlh cagar budaya yg terdata</i>	61		112		112		116		120	
					n/a	<b>n/a</b>	n/a	<b>n/a</b>	n/a	<b>n/a</b>	n/a	<b>25.00 %</b>	n/a	<b>25.00 %</b>
					154,000	<b>80.96 %</b>	3,992	<b>-97.41%</b>	4,191	<b>4.98%</b>	4,401	<b>5.01%</b>	4,665	<b>6.00%</b>

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -										
					I (2019)		I (2019)		I (2019)		I (2019)		I (2019)		
					5	5	5	5	5	5	5	5			
				8	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datan ke Kabupaten Rumus : $Jlh\ wisnu\ thn\ n-jlh\ wisnu\ thn\ (n-1)\ per\ jlh\ wisnu\ thn\ n-1\ kali\ 100\%$	1,760,000	52.89%	237,726	86.49%	261,498	10.00%	300,722	15.00%	410,790	36.60%
				9	Tingkat Hunian Akomodasi (Persen) Rumus : $Jlh\ Pengunjung\ yang\ cek-in/cek-out\ per\ jumlah\ kamar\ yang\ tersedia$		65.39%		38.66%		54.88%		63.19%		68.27%
				10	Persentase produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya Rumus : $Jumlah\ produk/jasa\ bidang\ pariwisata\ dan\ ekonomi\ kreatif\ yang\ didaftarkan\ kekayaan\ intelektualnya\ per\ jumlah\ produk/jasa\ bidang\ pariwisata\ dan\ ekonomi\ kreatif\ yang\ terdata$	n/a	n/a	0	0.00%	0	0.00%	1	50.00%	1	50.00%
				11	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkat kualitasnya melalui Pembekalan sektor kepariwisataan Rumus : $Jumlah\ SDM\ Pariwisata\ dan\ Ekonomi\ kreatif\ yang\ mengikuti\ pelatihan/Pembekalan\ sektor\ kepariwisataan\ per\ Jumlah\ tenaga\ kerja\ sektor\ pariwisata\ \&\ Ekkrafyang\ terdata$	200	24.88%	150	18.66%	-	0.00%	100	12.44%	150	18.66%
						804		804		804		804		804	

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi dan kebijakan

Dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah PD menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi dan Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Minahasa disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bagi seluruh OPD lingkup pemerintah Kabupaten Minahasa, serta acuan bagi para stakeholder terkait dalam partisipasi aktif pembangunan

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana PD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*).

Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Strategi pembangunan dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa untuk mewujudkan Menjabarkan Visi dan Misi R3D; Yaitu Misi yang kedua : **“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan mendorong Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata”**

### **5.1.1.Strategi**

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Guna mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa sesuai dengan analisa akar Masalah, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya pariwisata alam, budaya dan minat khusus (edu-tourism dan eco-tourism) untuk mewujudkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi.
2. Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Pariwisata serta optimalisasi sumber daya manusia pariwisata Pengembangan Pengelolaan Keragaman.
3. Pelestarian dan pengelolaan kekayaan budaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kebudayaan.
4. Pembinaan, dan pengembangan potensi seni, pelestarian kesenian daerah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kesenian.
5. Meningkatkan Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan penataan obyek wisata, pengembangan kawasan wisata andalan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepariwisataan.

### **5.1.2 Arah kebijakan**

Arah Kebijakan merupakan instrumen langkah-langkah dalam perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindakan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa perlu mengambil strategi dan memunculkan kebijakan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan

Fungsi pada organisasi untuk mendukung terhadap tujuan dan sasaran organisasi.

Arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk 5 (lima) tahun ke depan yakni :

1. Peningkatan kualitas dan tata kelola objek wisata melalui optimalisasi kualitas sumber daya manusia baik di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta masyarakat maupun pelaku usaha pariwisata melalui pelatihan peningkatan kapasitas SDM pariwisata.
2. Melakukan *branding, selling dan marketing* pariwisata dan kebudayaan melalui berbagai media, mengikuti pameran promosi dan pemasaran serta penyelenggaraan event-event promosi baik didalam dan luar negeri.
3. Pemanfaatan teknologi dalam promosi dan pemasaran.
4. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui pengembangan database bidang kebudayaan, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pelaku dan pemerhati budaya serta meningkatkan kapasitas sdm kebudayaan.
5. Pemanfaatan dan pengembangan karya seni budaya yaitu tampilan tarian daerah, kesenian tradisional, serta pakaian adatmusic melalui peningkatan kapasitas sdm kesenian (Tim Kesenian daerah, sanggar seni dan kelompok masyarakat pelaku kesenian).
6. Peningkatan kualitas destinasi pariwisata
7. Pengembangan dan penataan daya tarik wisata Destinasi Pariwisata (Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas).

Strategi dan kebijakan tersebut akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dinyatakan dalam Tabel 5.2 (T-C.26)

**Tabel 5.2. (T-C.26)**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa**

<b>VISI RPJMD</b>	: <b>Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera</b>		
<b>MISI II</b>	: <b>Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan mendorong Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata</b>		
Tujuan 1	: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		
<b>Sasaran 3</b>	: <b>Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata</b>		
<b>MISI V</b>	: <b>Memantapkan manajemen birokrasi yang professional melalui tata Kelola pemerintahan yang baik</b>		
Tujuan 2	Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang		
<b>Sasaran 3</b>	: <b>Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>		
<b>Tujuan Perangkat Daerah</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</b> <i>Indikator :</i> <i>Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah</i> <i>2. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD</i>	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan, integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.	Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan, meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah melalui
<b>2. Meningkatnya apresiasi dan peran masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya</b> <i>Indikator :</i> <i>Persentase pelestarian warisan budaya</i>	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Pelestarian dan pengelolaan kekayaan budaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kebudayaan	Melakukan Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui pengembangan database bidang kebudayaan, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pelaku dan pemerhati budaya serta meningkatkan kapasitas sdm kebudayaan

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
		Pembinaan, dan pengembangan potensi seni, pelestarian kesenian daerah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kesenian	Pemanfaatan dan pengembangan karya seni budaya yaitu tampilan tarian daerah, kesenian tradisional, serta pakaian adatmusic melalui peningkatan kapasitas sdm kesenian (Tim Kesenian daerah, sanggar seni dan kelompok masyarakat pelaku kesenian)
<b>3.Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata</b> <b>Indikator :</b> <b>1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku;</b>  <b>2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD</b>	Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Minahasa	Meningkatkan Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan penataan obyek wisata, pengembangan kawasan wisata andalan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas destinasi pariwisata</li> <li>- Pengembangan dan penataan daya tarik wisata /Destinasi Pariwisata (Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas)</li> </ul>
		Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Pariwisata serta optimalisasi sumber daya manusia pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan <i>branding, selling dan marketing</i> pariwisata dan kebudayaan melalui berbagai media, mengikuti pameran promosi dan pemasaran serta penyelenggaraan event-event promosi baik didalam dan luar negeri.</li> <li>-Pemanfaatan teknologi dalam promosi dan pemasaran</li> </ul>
		Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Pariwisata untuk meningkatkan <i>length of stay</i>	Melakukan <i>branding, selling dan marketing</i> pariwisata dan kebudayaan melalui berbagai media, mengikuti pameran promosi &pemasaran sertapenyelenggaraan event promosi baik didalam & luar negeri.
		Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya pariwisata alam, budaya dan minat khusus (edu-tourism dan eco-tourism) untuk mewujudkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi.	Peningkatan kualitas dan tata kelola objek wisata melalui optimalisasi kualitas sumber daya manusia baik di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta masyarakat maupun pelaku usaha pariwisata melalui pelatihan peningkatan kapasitas SDM pariwisata



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa untuk 5 (lima) tahun ke depan merupakan program prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023. Rencana prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD selanjutnya akan di jabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator keluaran program prioritas yang telah di tetapkan dalam RPJMD, merupakan indicator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.

#### **6.1 RENCANA PROGRAM DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, maka ditentukan rencana program yang berfungsi sebagai pedoman kerja operasional dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
7. Program pengembangan pemasaran pariwisata.

8. Program pengembangan destinasi pariwisata.
9. Program Pengembangan Kemitraan.

Sesuai dengan implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sejak Tahun 2021, terdiri dari 9 (Sembilan) Program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Pengembangan Kebudayaan;
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
4. Program Pengelolaan Permuseuman;
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
6. Program Pemasaran Pariwisata;
7. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
8. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

## **6.2 KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Minahasa. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa adalah:

### **1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

1. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran.

### **2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
2. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor;
3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor.

### **3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pegadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

- 4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5). Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**
1. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya local daerah;
  2. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
  3. Pengembangan Database sistem informasi sejarah purbakala
- 6). Program Pengelolaan Keragaman Budaya**
1. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah
  2. Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan
  3. Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya local
  4. Pemilihan Waraney Wulan Minahasa
  5. Perutusan Duta Pariwisata dalam Kegiatan Nyong Noni Sulut
  8. Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya
- 7). Program pengembangan pemasaran pariwisata**
1. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di alam dan luar negeri
  2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
  3. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri.
- 8). Program pengembangan destinasi pariwisata**
1. Pembuatan Jalur Pejalan Kaki/Jalan Setapak/Jalan Dalam Kawasan, Broadwalk, Pedestrian dan Tempat Parkir.
  2. Pemeliharaan Destinasi Pariwisata
  3. Pembangunan Dermaga Wisata di Kawasan Danau Tondano
  4. Pembangunan Pergola
  5. Pembangunan Gapura Identitas Objek Wisata Air Terjun Tapahan
  6. Pembangunan Menara Pandang di kawasan Danau Tondano
  7. Pembangunan Resting Area
  8. Pengadaan Rambu-rambu Petunjuk dalam kawasan objek wisata
  9. Pembangunan Gapura Identitas Kawasan Ekowisata di Desa Toloun Kec. Kombi Pantai Timur Minahasa

10. Pembangunan Taman Kota Kawangkoan

**9). Program Pengembangan Kemitraan**

1. Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata;
2. Pelatihan Tata Kelola Homestay;
3. Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Budaya;
4. Pelatihan Pemandu Selam;
5. Pelatihan Pemandu Wisata Alam;
6. Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja;
7. Pelatihan Pemandu Ekowisata
8. Pelatihan Pemandu Wisata Arung Jeram/Rafting
9. Penyusunan KLHS dan Ranperda RIPPARKAB Minahasa

Sesuai dengan implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH, **Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sejak Tahun 2021**, terdiri dari 7 (Tujuh) Program, yaitu :

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 2) Program Pengembangan Kebudayaan
  1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;

3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 3). Program Pengembangan Kesenian Tradisional
  1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- 4). Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
  1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
  2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- 5). Program Pengelolaan Permuseuman
  1. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
- 6). Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
  1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
  2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
  3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
  4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota;
- 7). Program Pemasaran Pariwisata
  1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- 8). Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
  1. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- 9). Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
  5. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Selengkapnya mengenai rencana, program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam Tabel 6.1 (T-C.27)

**Tabel 6.1 (T-C.27)**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA**  
**(NOMENKLATUR DISESUAIKAN DENGAN PERMEN 90 TAHUN 2019)**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2. Meningkatkan apresiasi dan peran masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya	2.1 Terlestarikannya Karya budaya dan Kesenian Tradisional			Persentase pelestarian warisan budaya	41.86 %	76.14 %		83.10 %		84.14 %		83.89 %		83.55 %		83.55 %		
				Persentase pelestarian warisan budaya	41.86 %	76.14 %		83.10 %		84.14 %		83.89 %		83.55 %		83.55 %		
				Persentase karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi	55.56 %	66.67 %		66.67 %		66.67 %		70.00 %		70.00 %		70.00 %		
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian warisan budaya	41.86 %	76,14 %	44,991,000	83,10 %	72,617,206	84,14 %	156,913,630	83,89 %	152,100,000	83,55 %	89,000,000	83,55 %	0	
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	41.86 %	76.14 %	44,991,000	83.10 %	72,617,206	84.14 %	156,913,630	83.89 %	152,100,000	83.55 %	89,000,000	83.55 %	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi	55.56 %	66,67 %	541,930,000	66,67 %	562,079,648	66,67 %	2,100,000	70,00 %	2,100,000	70,00 %	89,000,000	70,00 %	0	

		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi	6 Jenis	6 Jenis	541,930,000	6 Jenis	562,079,648	6 Jenis	2,100,000	7 Jenis	2,100,000	7 Jenis	89,000,000	7 Jenis	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Karya Budaya dan Kesenian Tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi	55.56 %	66.67 %	541,930,000	66.67 %	562,079,648	66.67 %	2,100,000	70.00 %	2,100,000	70.00 %	89,000,000	70.00 %	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	<b>2.2 Terlestarikannya Cagar Budaya</b>			Persentase cagar budaya yang dilestarikan	35.29 %	77.22 %		84.21 %		82.36 %		83.45 %		84.51 %		84.51 %		
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	35.29 %	77,22 %	44,991,000	84,21 %	72,617,206	82,35 %	156,913,630	83,45 %	152,100,000	84,51 %	89,000,000	84,51 %	0	
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (Jumlah objek kebudayaan yang dilindungi : inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	12 cagar Budaya	61 cagar Budaya	0	112 cagar Budaya	0	112 cagar Budaya	0	116 cagar Budaya	0	120 cagar Budaya	89,000,000	120 cagar Budaya	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	- %	- %	0	- %	0	- %	0	- %	0	25 %	0	25 %	0	
		2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi museum yang terdata	NA Buah	NA Buah	0	NA Buah	0	NA Buah	0	NA Buah	0	4 Buah	100,000,000	NA Buah	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

3. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata				Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	6,98 %	6,53 %	-	20,04 %	1 %	2 %	3 %	3 %								
				Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	7,558 Miliar	10,989 Miliar	-	5,905 Miliar	8,020 Miliar	8,181 Miliar	8,344 Miliar	41,440 Miliar								
3.1 Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Minahasa				Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per kebangsaan	13.83 %	80.96 %	-	97.41 %	4.98 %	5.01 %	6.00 %	6.00 %								
				Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datan ke Kabupaten	14.99 %	52.89 %	-	86.49 %	10.00 %	15.00 %	36.60 %	36.60 %								
				Tingkat Hunian Akomodasi (Persen)	61.96 %	65.39 %		38.66 %	54.88 %	63.19 %	68.27 %	68.27 %								
				Persentase produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya	na %	na %		na %	0.00 %	50.00 %	50.00 %	100.00 %								
				Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkat kualitasnya melalui Pembekalan sektor kepariwisataan	0 %	32.00 %		30.00 %	0.00 %	10.00 %	28.00 %	100.00 %								
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten	7,558 Miliar	10,989 Miliar	0	5,905 Miliar	0	8,020 Miliar	0	8,181 Miliar	0	8,344 Miliar	0	41,440 Miliar	0			



			PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	6,98 %	6,53 %	0	20,04 %	0	1 %	0	2 %	0	3 %	0	3 %	0	
				Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per kebangsaan	13,83 %	80,96 %	2,357,169,480	97,41 %	3,777,978,995	4,98 %	74,376,522	5,01 %	150,469,218	6 %	1,218,000,000	6 %	0	
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW yang dikelola	1 DTW	1 DTW	0	1 DTW	0	1 DTW	0	1 DTW	0	1 DTW	0	5 DTW	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	1 Destinasi	3 Destinasi	2,357,169,480	1 Destinasi	2,824,986,116	1 Destinasi	74,376,522	1 Destinasi	150,469,218	1 Destinasi	1,218,000,000	7 Destinasi	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis yang dikelola	1 Kawasan	Kawasan	0	0 Kawasan	0	1 Kawasan	519,130,973	1 Kawasan	0	1 Kawasan	0	3 Kawasan	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		0		0				0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	14,99 %	52,89 %	610,978,961	86,49 %	1,224,317,348	10,00 %	779,540,104	15,00 %	469,265,422	36,60 %	968,631,000	36,60 %	0	
				Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	13,83 %	80,96 %	0	97,41 %	0	4,98 %	0	5,01 %	0	6,00 %	0	6,00 %	0	
				Tingkat hunian akomodasi	61,96 %	65,39 %	0	38,66 %	0	54,88 %	0	63,19 %	0	68,27 %	0	68,27 %	0	

		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara/ peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten di Kabupaten Minahasa	1.151.150 Wisman	1.760.000 Wisman	610,978,961	237.726 Wisman	1,224,317,348	261.498 Wisman	779,540,104	300.722 Wisman	469,265,422	410.790 Wisman	968,631,780	1.970.736 Wisman	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	85.100 Wisman	154.000 Wisman	0	3.992 Wisman	0	4.191 Wisman	0	4.401 Wisman	0	4.665 Wisman	0	171.249 Wisman	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya	NA %	NA %	0	NA %	0	NA %	0	50 %	0	50 %	200,000,000	50 %	0	
		3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produk/Jasa Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya	na %	na %	0	na %	0	na %	0	50 %	0	50 %	200,000,000	100 %	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkatkan kualitasnya melalui Pembekalan sektor kepariwisataa	NA %	32 %	737,553,575	30 %	753,235,000	0 %	0	10 %	0	28 %	530,357,770	100 %	0	

		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengikuti pelatihan /pembekalan sektor kepariwisataan	0 Orang	200 Org	737,553,575	160 Org	753,235,000	0 Org	0	0 Org	0	140 Org	530,357,770	500 Org	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
<b>1. MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	C Predikat	CC Predikat		B Predikat		BB Predikat		BB Predikat		A Predikat		A Predikat		
	<b>1.1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah</b>			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	na Predikat	NA Predikat		NA Predikat		B Predikat		B Predikat		B Predikat		4 Predikat		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan penunjang Urusan Perangkat Daerah	4 Score	4 Score	3,173,662,000	4 Score	2,904,479,000	4 Score	3,212,814,617	4 Score	3,229,786,000	4 Score	3,294,281,000	4 Score	0	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	9,967,000	4 Dokumen	7,317,177	4 Dokumen	5,684,283	4 Dokumen	5,684,283	4 Dokumen	26,000,000	4 Dokumen	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	2,650,431,475	12 Bulan	2,469,884,564	12 Bulan	2,595,596,907	12 Bulan	2,458,759,793	12 Bulan	2,856,718,585	12 Bulan	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	21 Stel	21 Stel	22,000,000	21 Stel	0	21 Stel	42,500,000	21 Stel	0	21 Stel	18,207,000	21 Stel	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur sesuai RKBM	50 %	60.00 %	17,820,000	65.00 %	24,382,000	70.00 %	19,440,000	75.00 %	12,776,060	80.00 %	19,440,000	80.00 %	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	91,061,703	12 Bulan	123,221,316	12 Bulan	333,078,000	12 Bulan	308,178,000	12 Bulan	438,592,230	12 Bulan	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi	80.00 %	83.00 %	182,927,169	83.00 %	77,053,060	84.00 %	38,480,000	84.00 %	38,480,000	85.00 %	262,000,000	85.00 %	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**Tabel 7.1**  
**IKU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -				
			TAHUN I(2019)	TAHUN II(2020)	TAHUN III(2021)	TAHUN IV(2022)	TAHUN V(2023)
1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Kepuasan stakeholders terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah (Score 1 - 4)	4	4	4	4	4
2	Terlestarikannya Karya budaya dan Kesenian Tradisional	Persentase pelestarian warisan budaya (Program pengembangan kebudayaan)	76.14%	83.10%	83.89%	83.55%	83.55%
		Persentase karya budaya dan kesenian tradisional yang direvitalisasi dan diinventarisasi	66.67%	66.67%	66.67%	70.00%	70.00%
3	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	77.22%	84.21%	82.35%	83.45%	84.51%
		Persentase pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	n/a	n/a	n/a	25.00%	25.00%
4	Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Minahasa	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per kebangsaan	80.96%	-97.41%	4.98%	5.01%	6.00%
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	52.89%	-86.49%	10.00%	15.00%	36.60%
		Tingkat Hunian Akomodasi (Persen)	65.39%	38.66%	54.88%	63.19%	68.27%
		Persentase produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya	n/a	n/a	0.00%	50.00%	50.00%
		Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang meningkat kualitasnya melalui Pembekalan sektor kepariwisataan	32.00%	30.00%	0.00%	10.00%	28.00%

Target Indikator Kinerja disesuaikan pada tahun 2021, dan akan berlaku mulai tahun 2022. Adapun capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.2 berikut ini :

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	<b>PERSENTASE KONTRIBUSI PDRB sektor pariwisata</b> (Setelah Perubahan RPJMD)	%	6,98	6,53	-20,04	1,00	2,00	3,00	3,00
2.	<b>KONTRIBUSI PAD sektor pariwisata</b> (Setelah Perubahan RPJMD)	Milyar	7.558	10.989	5.905	8.020	8.181	8.344	41.439

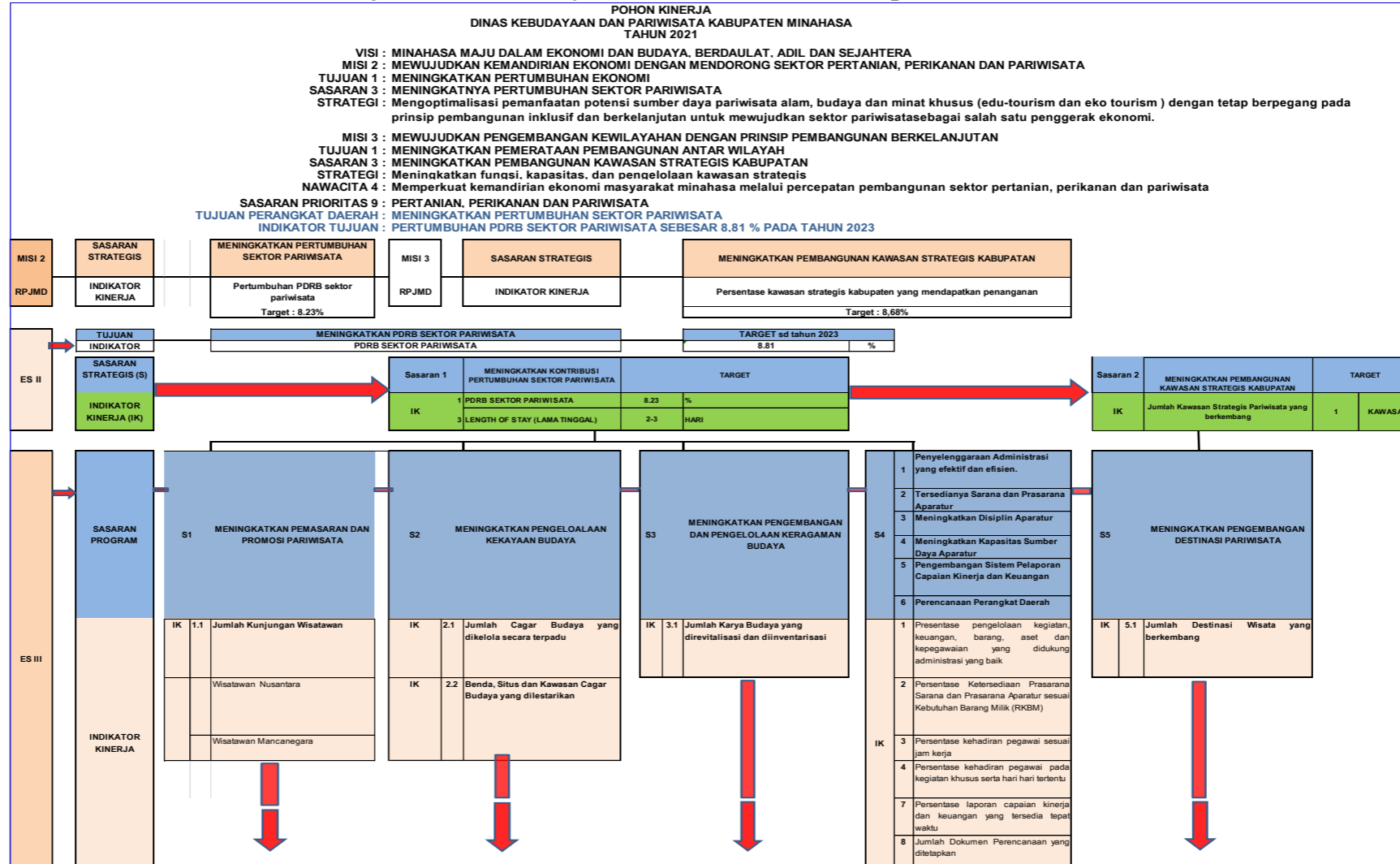
*Sumber Data : Kabupaten Minahasa dalam angka tahun 2021 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Minahasa (persen)*

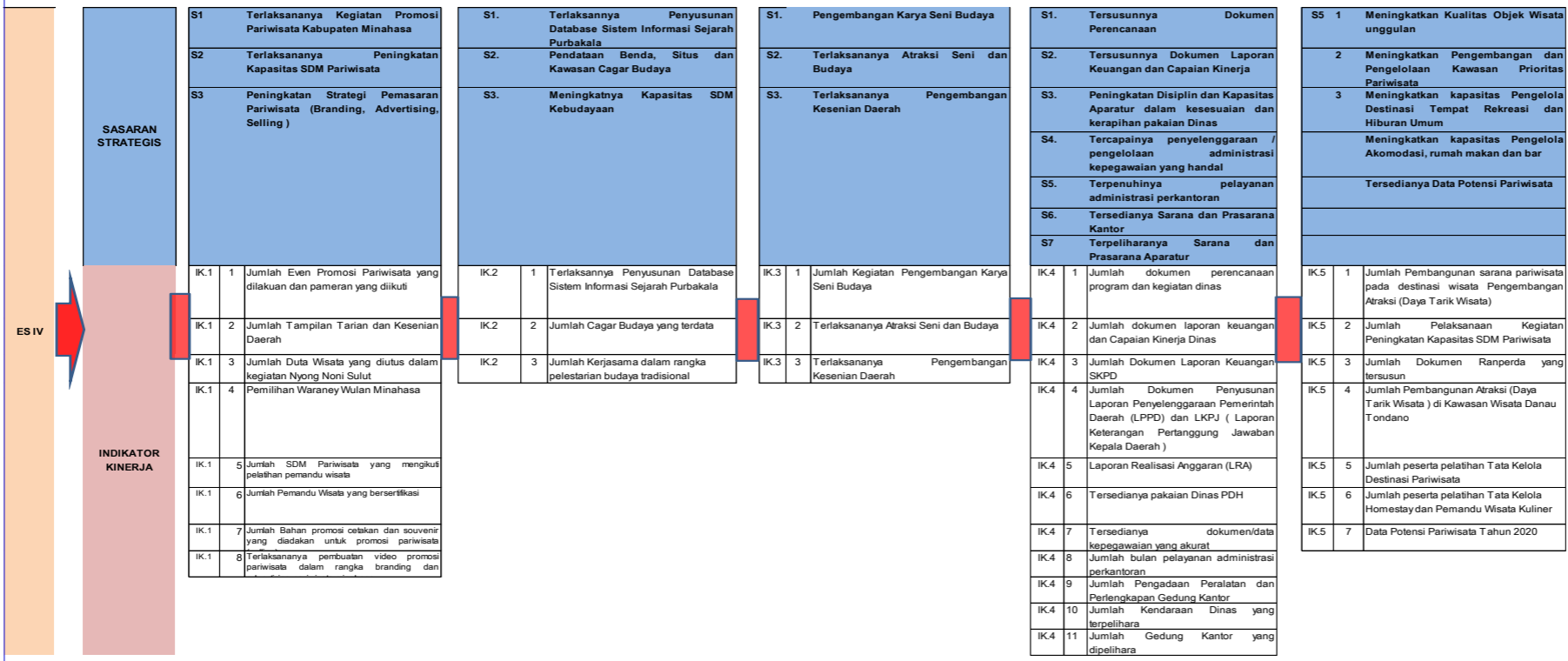
Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Target indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. Adapun indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dijabarkan dalam cascading kinerja Eselon II, Eselon III dan Eselon IV, sebagaimana dalam Table 7.2 Pohon Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dan Tabel 7.3 Cascading Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa




**Table 7.2**  
**Pohon Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa**





**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KEPALA DINAS**



**DRS. TEDDY D. SUMUAL, MAP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19650712 199203 1 010**

**Tabel 7.3**  
**Cascading Kinerja**

**CASCADING DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA  
TAHUN 2021**

- VISI RPJMD : MINAHASA MAJU DALAM EKONOMI DAN BUDAYA, BERDAULAT, ADIL DAN SEJAHTERA**
- MISI 2 : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENDORONG SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN DAN PARIWISATA**
- TUJUAN 1 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI**
- SASARAN 3 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN SEKTOR PARIWISATA**
- STRATEGI :** Mengoptimisasi pemanfaatan potensi sumber daya pariwisata alam, budaya dan minat khusus (edu-tourism dan eco tourism ) dengan tetap berpegang pada prinsip pembangunan inklusif dan berkelanjutan untuk mewujudkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi.
- MISI 3 : MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN DENGAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**
- TUJUAN 1 : MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH**
- SASARAN 3 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**
- STRATEGI :** Meningkatkan fungsi, kapasitas, dan pengelolaan kawasan strategis
- NAWACITA 4 :** Memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat minahasa melalui percepatan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata
- MISI 5 : MEMANTAPKAN MANAJEMEN BIROKRASI YANG PROFESIONAL MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**
- TUJUAN PERANGKAT DAERAH : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN SEKTOR PARIWISATA**
- INDIKATOR TUJUAN : PERTUMBUHAN PDRE SEKTOR PARIWISATA SEBESAR 8,81 % PADA TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PARIWISATA	PDRB SEKTOR PARIWISATA	8.23 %	SEKRETARIS DINAS
	LENGTH OF STAY	2-3 HARI	
2 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA	JUMLAH KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA YANG BERKEMBANG	1 Kawasan	KEPALA BIDANG

**SEKRETARIS DINAS**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyelenggaraan Administrasi yang efektif dan efisien.	Persentase pengelolaan kegiatan, keuangan, barang, aset dan kepegawaian yang didukung administrasi yang baik	95 %
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Prasarana Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai Kebutuhan Barang Milik (RKBM)	61 %
3	Meningkatkan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja	>90 %
		Persentase kehadiran pegawai pada kegiatan khusus serta hari hari tertentu	>90 %
5	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersedia tepat waktu	95 %
6	Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang ditetapkan	4 Dokumen

**KASUBAG PROGRAM KEUANGAN DAN PELAPORAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan dinas	4 Dokumen
2	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja	4 Dokumen

**KASUBAG KEPEGAWAIAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercapainya penyelenggaraan / pengelolaan administrasi kepegawaian yang handal	Tersedianya dokumen /data kepegawaian yang akurat	4 Dokumen

**KASUBAG UMUM DAN PERLENGKAPAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenubinya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	10 Unit
3	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	1 Unit

**KEPALA BIDANG PROMOSI DAN PEMASARAN**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN	Persentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan	7.49 %
		Jumlah kunjungan Wisman	4,191 4.98 %
		Jumlah Kunjungan Wisnus	261,498 10.00 %
		Jumlah Total Kunjungan Wisatawan	265,689 Orang

**KEPALA SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN PROMOSI**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Kegiatan Promosi Pariwisata Kabupaten Minahasa	Jumlah Even Promosi Pariwisata yang dilakukan dan pameran yang diikuti	1 Even
		Jumlah Tampilan Tarian dan Kesenian Daerah	54 Kali
		Jumlah Duta Wisata yang diutus dalam kegiatan Nyong Noni Sulut	2 Orang
		Pemilihan Waraney Wulan Minahasa	1 Kegiatan

**KEPALA SEKSI PENYULUHAN BIMBINGAN WISATA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang mengikuti pelatihan pemandu wisata	40 Orang

**KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN PEMASARAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Strategi Pemasaran Pariwisata (Branding, Advertising, Selling )	Jumlah Bahan promosi cetakan dan souvenir yang diadakan	630 Buah
		Pembuatan video promosi pariwisata	1 Paket

**KEPALA BIDANG PARIWISATA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	MENINGKATKAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata yang berkembang	1 Destinasi

**KEPALA SEKSI OBJEK WISATA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Objek Wisata unggulan	Jumlah Objek Wisata yang terpelihara	1 Objek Wisata

**KEPALA SEKSI REKREASI DAN HIBURAN UMUM**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Prioritas Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata di Kawasan Wisata Danau Tondano yang ditingkatkan pengelolannya	1 Destinasi
2	Meningkatkan kapasitas Pengelola Destinasi Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum	Jumlah peserta pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	40 Orang

**KEPALA SEKSI AKOMODASI, RUMAH MAKAN DAN BAR**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Pengelola Akomodasi, rumah makan dan bar	Jumlah peserta pelatihan Tata Kelola Homestay dan Pemandu Wisata Kuliner	40 Orang
2	Tersedianya Data Potensi Pariwisata	Data Potensi Pariwisata Tahun 2021	1 Dokumen

**KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	MENINGKATKAN PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	20	Cagar Budaya
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	48	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya

**KEPALA BIDANG KESENIAN**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	MENINGKATKAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	7	KARYA BUDAYA

**KEPALA SEKSI PERMUSEUMAN, KEPURBAKALAN DAN ARKEOLOGI**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Penyusunan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala	Jumlah Dokumen Database sistem informasi sejarah purbakala	1	Dok

**KEPALA SEKSI SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Pendataan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Laporan Hasil Pendataan	1	Laporan

**KEPALA SEKSI PELESTARIAN BUDAYA TRADISIONAL**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Kebudayaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Mengenai Pengelolaan dan pelestarian Kekayaan budaya	25	Org

**KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN SENI TRADISIONAL**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Terlaksananya Penyusunan database Kesenian dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Database Kesenian dan Kebudayaan yang tersusun	1	Dokumen

**KEPALA SEKSI ATRAKSI SENI**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Terlaksananya Atraksi Seni dan Budaya	Jumlah tampilan tarian dan kesenian daerah	54	Kali

**KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Terlaksananya Pengembangan Kesenian Daerah	Jenis Tarian yang dikembangkan	2	Jenis

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KEPALA DINAS



DRS. TEDDY D. SUMUAL, MAP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650712 199203 1 010

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Semua program kerja yang telah dikemukakan merupakan rencana yang disusun oleh Dinas Kebudayaan dan Kabupaten Minahasa, dengan mengacu pada arah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, sebagai bentuk upaya optimalisasi Kebudayaan yang ada serta potensi pariwisata yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian daerah.

Kebudayaan di Kabupaten Minahasa secara optimal diusahakan untuk tetap di lestariakan demikian juga dengan Pariwisata tidak berkembang secara tiba-tiba, perlu waktu dan ada tahapan-tahapan perkembangan yang harus dilalui. Penyediaan infrastruktur yang mendukung, angkutan, komunikasi dan jasa penunjang Budaya dan kepariwisataan yang diharapkan dapat bersinergi saling mendukung kelancaran pembangunan serta program nasional lainnya.

Investasi Pariwisata juga tidak berkembang secara otomatis. Suatu daerah yang memiliki potensi daya tarik wisata yang unik dan menarik tidak begitu saja menjadi daerah tujuan wisata yang ramai dikunjungi wisatawan. Dibutuhkan sumber daya sebagai modal dan kemauan keras dari semua pihak, termasuk komitmen yang menerus dari penentu kebijakan, untuk melestarikan budaya serta mengembangkan dan mendukung pembangunan pariwisata.

Pariwisata bukanlah tujuan akhir, tapi merupakan salah satu alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Demikian juga dengan Budaya yang senantiasa harus terus dijaga sebagai identitas dan kekayaan Daerah maka melestarikan budaya serta membangun pariwisata haruslah direncanakan secara terarah dan bertahap dengan sasaran-sasaran yang jelas menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Perencanaan yang jelas merupakan syarat mutlak bagi pengembangan pariwisata. Tanpa arah pengembangan yang pasti dan disepakati oleh seluruh *stakeholders*, maka pembangunan yang dilaksanakan dapat kehilangan fokus dan rentan terhadap kemungkinan munculnya dampak negatif yang tidak diinginkan.

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN MINAHASA,**

**Drs. TEDDY D. SUMUAL, MAP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650712 199203 1 010**